

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah” berangkat dari permasalahan penerapan ideologi partai politik, secara khusus menganalisa tentang penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah serta meninjau pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual mengenai ideologi marhaenisme, orientasi ideologi dan elemen penyusun ideologi partai politik.

Berdasarkan pada proses penelitian, penyajian data dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai marhaenisme terdapat dalam setiap fungsi partai politik yang dijalankan oleh DPD PDI-P Jawa Tengah, meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Tinjauan melalui komunikasi politik yang dilakukan di DPD PDI-P Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dalam menjalankan fungsi aspirasi, agregasi dan artikulasi, hal yang berkaitan dengan kepentingan *wong cilik* menempati skala prioritas pertama untuk kemudian diperjuangkan kader dan anggota yang duduk di parlemen Jawa Tengah sebagai suatu bentuk usaha

materialisasi ideologi. Konsep tersebut juga diterapkan dalam hal pengaturan konflik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah. Proses sosialisasi politik yang dilakukan DPD PDI-P Jawa Tengah fokus pada upaya penanaman nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan partai, masif dilakukan dalam Komunitas Juang Jawa Tengah sebagai sayap partai. Rekrutmen internal yang dilakukan DPD PDI-P Jawa Tengah dalam pemilihan ketua mengedepankan musyawarah mufakat disetiap pengambilan keputusan. Hal tersebut sebagai upaya penerapan nilai marhaenisme dalam prinsip sosio-demokrasi.

2. Orientasi kognitif banyak berperan dalam menggambarkan realitas pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. Orientasi kognitif tersebut berkaitan dengan pengetahuan kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Orientasi tersebut bersifat pemahaman informatif belum pada tahap pelibatan perasaan dan kombinasi nilai marhaenisme dalam tindakan. Akibatnya, materialisasi nilai marhaenisme yang telah terkonsep dalam fungsi partai politik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah tidak berjalan.
3. Hambatan dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah adalah kurangnya pemahaman kader dan anggota tentang marhaenisme baik secara konseptual maupun praksis. Hal tersebut merupakan efek dari orientasi ideologi yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah.

4. Tantangan dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah adalah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang sangat pesat. Kondisi tersebut membuat DPD PDI-P Jawa Tengah harus selalu melakukan penyesuaian dalam penerapan marhaenisme agar sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Selain itu, DPD PDI-P Jawa Tengah juga dituntut oleh kemajuan zaman yang ada agar memiliki konsistensi dalam menerjemahkan dasar perjuangan dengan menggunakan perangkat analisis yang tajam.

4.2 Saran

Berdasarkan penyajian data, pembahasan serta kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian dengan judul Studi Orientasi Marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah ini maka terdapat saran yang penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pemahaman kader dan anggota melalui kaderisasi berkesinambungan**

Selama ini kaderisasi yang dilakukan dalam DPD PDI-P Jawa Tengah sebatas terprogram dan berjenjang, diantaranya melalui kursus kader. Hal yang perlu difahami bahwasanya kaderisasi tidak cukup dalam konsep terprogram dan berjenjang, harus adanya kaderisasi berkesinambungan. Tujuannya adalah bahwa setelah penanaman nilai dapat dilakukan pada kader dan anggota maka perlu adanya pengembangan jaringan kerja ke komponen-komponen masyarakat agar lebih mendekatkan

diri terutama pada *wong cilik*. Kaderisasi berkesinambungan menugaskan para kadernya untuk ditempatkan dalam jaringan kemasyarakatan yang dibangun sebagai cara dan pola rekrutmen untuk melahirkan para pemimpin partai yang berkualitas dan berpihak pada rakyat kecil. Maka para aktivis partai yang sudah mengikuti Pendidikan kader harus memiliki pengalaman lebih bersama masyarakat, sebagai contoh melalui organisasi pemuda, petani, buruh dan lain sebagainya sebelum diajukan partai untuk penugasan di Lembaga eksekutif maupun legislatif.

2. Alokasi dana untuk proses kaderisasi dan penanaman nilai ideologi

Perlu adanya peningkatan alokasi dana bagi proses kaderisasi dan penanaman nilai ideologi partai agar proses tersebut lebih bisa dimaksimalkan. Dalam hal ini DPD PDI-P Jawa Tengah harus lebih mengaktifkan iuran pengurus agar memiliki keterikatan tanggungjawabnya kepada partai terutama pada kader dan anggota di Jawa Tengah serta agar tidak selalu mengandalkan dana dari kalangan atas.

3. Materialisme ideologi sesuai konteks ruang dan waktu

Kondisi di luar partai seperti perubahan dalam masyarakat, kemajuan teknologi maupun globalisasi mengharuskan DPD PDI-P Jawa Tengah menempuh langkah-langkah adaptasi dengan cepat. Mengingat bahwa dunia politik tidak terbatas pada Pemilu, parlemen ataupun kekuasaan semata. Tetapi perlu juga diperhatikan aspek ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan dan keamanan, Pendidikan, kesejahteraan sosial serta teknologi agar partai politik dapat masuk ke ruang-ruang berbangsa dan bernegara dengan optimal. Maka dari itu ideologi partai politik harus mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan zaman yang ada. Atribut-atribut ideologi partai politik seperti kebijakan, strategi partai, isu politik, budaya organisasi dan lain sebagainya dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam masyarakat agar penyelesaian masalah yang ada menjadi tepat dan optimal.